



Digital Government dan Pelestarian Budaya Topeng Malangan: Strategi Tata Kelola Berkelanjutan Menuju SDG 11 di Kota Malang

Aza Ma'rifatun Niswa^{1*}, Aditya Dwi Ramadhan², Wulan Marcelina Azhari³, Ayyash Musyari Prawira⁴, Ananda Shierly Patricia⁵, Prisca Kiki Wulandari⁶

Universitas Brawijaya

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i3.6005>

*Correspondence: Aza Ma'rifatun Niswa

Email: azaniswa@student.ub.ac.id

Received: 07-03-2026

Accepted: 19-04-2026

Published: 05-07-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pelestarian budaya lokal merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG) 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan. Namun, warisan budaya tak benda seperti Topeng Malangan di Kota Malang menghadapi tantangan serius, mulai dari menurunnya minat generasi muda, keterbatasan regenerasi pelaku seni, hingga lemahnya implementasi kebijakan pelestarian. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan sebagai implementasi nyata SDG 11 di Kota Malang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif moderat, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi kebijakan dan laporan terkait. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Topeng Malangan telah berjalan melalui dua dimensi utama menurut teori Jacob (2005), yaitu konservasi fisik yang diwujudkan melalui inovasi bahan baku dari kayu ke resin dan kertas serta penyediaan ruang pameran publik, dan revitalisasi nilai melalui diversifikasi produk turunan, kolaborasi dengan sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*learning by doing*) di sanggar seni. Namun, konservasi fisik masih bersifat reaktif dan parsial karena belum adanya roadmap pelestarian yang komprehensif dari pemerintah daerah, sementara revitalisasi nilai menunjukkan dinamika menjanjikan namun menghadapi risiko jebakan pendekatan "museum" yang kaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran ganda platform digital sebagai instrumen konservasi dan revitalisasi, serta penguatan kelembagaan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola warisan budaya yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci: Topeng Malangan, Pelestarian Budaya, Digital Government, SDG 11, Tata Kelola Warisan Budaya

Abstract: Preserving local culture is an important pillar in realizing sustainable urban development, in line with the target of Sustainable Development Goals (SDG) 11 on sustainable cities and communities. However, intangible cultural heritage such as the Malangan Mask in Malang City faces serious challenges, ranging from declining interest among the younger generation, limited regeneration of artists, to weak implementation of preservation policies. This study aims to analyze the governance of local government and community in preserving the Malangan Mask as a real implementation of SDG 11 in Malang City. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through moderated participatory observation, in-depth interviews with key informants, and studies of policy documentation and related reports. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, and validated through triangulation of sources and methods. The results of the study indicate that the preservation of the Malangan Mask has progressed through two main dimensions according to Jacob's theory (2005): physical conservation realized through innovation of raw materials from wood to resin and paper as well as the provision of public exhibition spaces, and revitalization of values through diversification of derivative products, collaboration with regular schools and Special Needs Schools (SLB), and an experiential learning approach (*learning by doing*) in art studios. However, physical conservation is still reactive and partial due to the absence of a comprehensive preservation roadmap from the local government, while revitalization of values shows promising

dynamics but faces the risk of falling into the trap of a rigid "museum" approach. This study recommends strengthening the dual role of digital platforms as instruments of conservation and revitalization, as well as strengthening institutions and synergy between stakeholders within a transparent, accountable, and participatory cultural heritage governance framework.

Keywords: *Malangan Masks, Cultural Preservation, Digital Government, SDG 11, Cultural Heritage Governance*

Pendahuluan

Pelestarian budaya lokal kini menjadi pilar krusial dalam mewujudkan pembangunan global yang inklusif, selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDG) 11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan. Budaya lokal merupakan salah satu identitas simbolis yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu, terlebih lagi sebuah budaya memiliki sebuah nilai yang dapat menjadi aset ekonomi kreatif bagi masyarakat, sehingga ia merupakan sebuah komponen penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota lalu perannya juga mampu memperkuat resiliensi sosial di tengah maraknya modernisasi dan tenggelamnya warisan budaya. Namun, menilik dari kondisi sosial saat ini yang menekan pembangunan yang masif seringkali menganggap bahwa warisan budaya ialah sebuah hal yang tidak memiliki posisi yang kuat, sehingga pelestarian warisan budaya menjadi posisi yang marginal. Dapat kami temukan bahwasanya literatur sebelumnya seperti milik [Febriantini et. al \(2019\)](#) yang menjelaskan kondisi desa Subak di Bali, mereka menemukan bahwasanya kontradiksi antara pengembangan kawasan pariwisata terutama pembangunan fasilitas umum ini merupakan hal yang bertentangan dengan regulasi perlindungan area hijau yang menjadi daya tarik utama wisata milik mereka dan seharusnya hal tersebut memiliki regulasi yang mengaturnya. Kondisi serupa juga ternyata dialami oleh Kota Tua Manggala yang belum mendapatkan perhatian dari pihak terkait terutama dari pemerintah setempat, padahal lokasi tersebut memiliki banyak sekali tempat yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang sesuai dengan syarat dari UNESCO maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 ([Cahya et al., 2023](#)).

Menilik dari beberapa kasus terdahulu, terdapat sebuah ketertarikan untuk dapat meninjau Kota Malang sebagai studi kasus dalam pelestarian budaya lokal. Dalam konteks di kota Malang, tantangan yang dihadapi sudah semakin kompleks dengan adanya warisan budaya yang unik yakni Topeng Malangan. Warisan budaya yang dimiliki oleh Kota Malang ini berbentuk sebuah seni pertunjukan tradisional yang mengakar kuat dalam identitas masyarakat setempat, namun pada akhirnya masih memiliki permasalahan terutama adanya arus modernisasi dan semakin berkurangnya generasi penerus pelaku seni Topeng Malangan seperti yang terjadi di desa Curungrejo dimana penggiat seni mengalami kendala dalam membentuk kelompok anak muda yang akan melestarikan seni Topeng karena kurangnya minat generasi muda ([Muniroch, 2025](#)). Upaya pelestarian warisan budaya sebenarnya tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional semata. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (*digital government*) merupakan salah satu hal yang bisa dikembangkan untuk menghadapi tantangan ini, sebuah digitalisasi dalam pemerintahan dapat membuka peluang baru bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pendekatan pelestarian yang lebih sistemik, transparan, dan partisipatif ([Buragohain et. al., 2024](#)).

Berbicara mengenai efektivitas pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi, melainkan juga pada kualitas tata kelola yang menopangnya. Menurut [Nurhatyati dan Rahman \(2023\)](#) dalam kajian miliknya menemukan bahwa meskipun minat terhadap pendekatan kolaboratif terus meningkat, masih banyak variabel kritis termasuk pemanfaatan teknologi dalam kolaborasi yang belum dieksplorasi secara memadai dalam penelitian yang ada. Lebih jauh, [Rizkwanti dan Kurniawan \(2025\)](#) menyoroti bahwa banyak program pemerintah daerah yang belum mampu menyentuh kebutuhan substantif masyarakat karena lemahnya mekanisme partisipasi dan perencanaan yang terintegrasi. Kondisi ini mencerminkan adanya *research gap* yang signifikan: belum banyak kajian yang secara spesifik mengaitkan mekanisme *digital government* dengan tata kelola pelestarian budaya lokal dalam kerangka SDG 11, khususnya pada kasus warisan budaya tak benda seperti Topeng Malang. Kebanyakan studi masih bersifat parsial, belum menyentuh bagaimana integrasi platform digital, transparansi birokrasi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat menjadi mesin penggerak pelestarian budaya yang berkelanjutan secara sistemik. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas strategi *digital government* dalam tata kelola pelestarian Topeng Malang sebagai implementasi nyata SDG 11 di Kota Malang.

Penelitian tentang tata kelola pelestarian Topeng Malang menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator telah berjalan melalui Perda No. 3 Tahun 2011, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dana hibah kepada Dewan Kesenian Kabupaten Malang, penyediaan sarana pertunjukan, dan promosi melalui landmark serta event kolaborasi budaya, namun masih terdapat kesenjangan antara produk hukum dan implementasi di lapangan karena regulasi yang belum spesifik mengatur budaya tak benda serta distribusi bantuan yang tidak merata dan kualitasnya yang perlu ditingkatkan ([Rafif, 2025](#)). Tantangan utama pelestarian terletak pada regenerasi, di mana perajin topeng di Kabupaten Malang saat ini hanya tersisa sekitar 10 orang dan kesulitan mencari generasi penerus, sementara Padepokan Asmorobangun yang telah melintasi beberapa generasi sejak 1900-an juga mengalami kelangkaan penerus di bidang penatah, pengrawit, dalang, sinden, dan pembuat rapek akibat pandemi Covid-19 yang menghentikan pertunjukan dan menutup tempat wisata sehingga perajin kehilangan pelanggan, meskipun upaya pelestarian terus dilakukan melalui pelatihan gratis oleh perajin seperti Ahmad Sholeh melalui Yayasan Murtitomo. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, transformasi digital menjadi strategi utama yang diimplementasikan melalui workshop pendokumentasian wayang topeng Malang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang diikuti 56 peserta dengan hasil dokumentasi diunggah ke kanal YouTube sebagai arsip digital dan media promosi, serta inisiatif akademisi dari Universitas Brawijaya yang berhasil mendigitalisasi 74 Topeng Cerita Panji dari Padepokan Asmorobangun ke dalam format Virtual Reality (VR) 3D untuk memperluas akses informasi dan mendukung pemasaran produk topeng yang permintaannya cukup tinggi hingga mancanegara. Di sisi lain, keterlibatan generasi muda dalam ekosistem Topeng Malang menunjukkan tren positif karena anak-anak muda dari usia sekolah hingga mahasiswa tetap aktif datang ke padepokan seni seperti

Asmorobangun, Tumpang, dan Jabung, sementara di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang, Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari menjadikan Topeng Malangan sebagai menu wajib dalam workshop dan pementasan, bahkan banyak kreator konten muda yang mengemas estetika Topeng Malangan ke dalam video pendek di TikTok, Instagram, dan YouTube serta mengeksplorasi motif topeng dalam industri fesyen dan seni kontemporer seperti Malang Flower Carnival, yang mengaitkan pelestarian dengan SDG 8 melalui penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing produk lokal. Namun demikian, penelitian terdahulu masih menyisakan kesenjangan signifikan karena studi tentang peran pemerintah masih bersifat deskriptif dan parsial tanpa mengaitkan secara sistemik dengan mekanisme digital government yang terintegrasi dalam perencanaan kota, penelitian tentang perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan mengungkap hambatan berupa sikap tertutup seniman terhadap birokrasi dan pendidikan rendah yang belum teratasi melalui pendekatan informal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta belum ada kajian yang secara spesifik mengintegrasikan platform digital, transparansi birokrasi, dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai mesin pelestarian berkelanjutan dalam kerangka SDG 11 mengenai perlindungan dan pelestarian warisan budaya dunia. Oleh karena itu, penelitian tentang tata kelola pelestarian Topeng Malangan perlu mengintegrasikan tiga dimensi analisis kebijakan dan implementasi program pemerintah daerah yang responsif, pemanfaatan teknologi digital dalam pelestarian dan promosi secara sistematis, serta mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan yang mengatasi hambatan birokrasi dan mendorong partisipasi substantif generasi muda untuk menjawab tantangan pelestarian sekaligus mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan sesuai SDG 11. Secara empiris, tantangan nyata di lapangan menunjukkan bahwa banyak produk hukum daerah terkait budaya hanya berhenti sebagai dokumen formalitas tanpa adanya roadmap implementasi yang jelas dan terukur. Fenomena ini diperparah dengan seringnya terjadi konflik kepentingan antara pengembang infrastruktur dengan pelestari situs sejarah, yang mencerminkan lemahnya pengawasan serta posisi tawar nilai budaya dalam perencanaan kota. Selain itu, rendahnya keterlibatan generasi muda dalam ekosistem budaya lokal menciptakan jurang relevansi yang membuat tradisi kian terasing dari kehidupan perkotaan modern. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada urgensi daerah tersebut yang memiliki kekayaan warisan budaya tinggi namun sedang menghadapi tekanan pembangunan masif, sehingga merepresentasikan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan modernitas dan jati diri. Melalui lokus ini, dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dapat diamati secara mendalam untuk merumuskan solusi tata kelola yang efektif. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tata kelola pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal sebagai implementasi nyata SDG 11.

Dalam penelitian ini, pisau analisis yang digunakan untuk penelitian dengan judul Digital Government dan Pelestarian Budaya Topeng Malangan: Strategi Tata Kelola Berkelanjutan Menuju SDG 11 di Kota Malang adalah teori Pelestarian Budaya karena Teori pelestarian budaya yang dikemukakan oleh [Jacob \(2005\)](#) menekankan bahwa upaya

pelestarian suatu warisan budaya harus mencakup dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu konservasi dan revitalisasi. Dimensi konservasi berfokus pada perlindungan fisik objek budaya agar keberadaannya tetap terjaga, yang dalam praktiknya dapat diwujudkan melalui inovasi bahan baku untuk menjaga keberlanjutan produksi serta penyediaan ruang atau fasilitas pameran sebagai wadah eksistensi budaya di ruang publik. Sementara itu, dimensi revitalisasi menekankan pada pembaruan nilai dan makna budaya agar tetap relevan dengan konteks kekinian, yang tidak cukup hanya dengan menghidupkan kembali bentuk orisinal, melainkan juga memperbaharui fungsi sosialnya melalui diversifikasi produk turunan, pewarisan nilai lintas generasi, serta keterlibatan aktif generasi muda melalui pendekatan pembelajaran langsung. Dengan demikian, teori pelestarian budaya menjadi pisau analisis yang paling tepat, sistematis, dan teruji untuk mengkaji strategi tata kelola berkelanjutan pelestarian Topeng Malangan di Kota Malang

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. [Sale et al. \(2002\)](#) menjelaskan bahwa pemilihan metode penelitian sangat dipengaruhi oleh paradigma yang dianut peneliti, yang pada dasarnya mencerminkan cara pandang terhadap realitas. Sejalan dengan itu, [Kasinath \(2013\)](#) mengemukakan bahwa terdapat tiga pertimbangan utama dalam penggunaan metode kualitatif, yaitu: (a) perspektif peneliti dalam melihat fenomena sosial, (b) karakteristik pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, serta (c) pertimbangan praktis yang berkaitan dengan karakteristik metode kualitatif itu sendiri. Sementara itu, [McCusker dan Gunaydin \(2015\)](#) menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih ketika tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana individu atau kelompok masyarakat merespons dan memaknai suatu isu tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran penting sebagai instrumen utama yang menginterpretasikan data, sehingga kualitas proses penelitian harus dijaga dengan baik. Metode kualitatif memungkinkan penyajian deskripsi yang kaya dan mendalam terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada permukaan peristiwa, tetapi juga menggali makna dan substansi yang terkandung di dalamnya. [Sofaer \(1999\)](#) menegaskan bahwa penelitian kualitatif tidak sekadar digunakan untuk memperoleh gambaran umum, melainkan juga untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai suatu fenomena. Dengan demikian, dalam menerapkan metode kualitatif, peneliti dituntut untuk memiliki pemahaman yang kuat dan memadai terkait isu yang diteliti agar mampu melakukan interpretasi data secara tepat dan bermakna.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami bagaimana praktik pelestarian budaya dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan dalam konteks pembangunan kota. Peneliti menerapkan observasi partisipatif moderat, yakni terlibat secara terbatas namun tetap aktif mengamati interaksi antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat. Aspek yang diamati meliputi aktivitas budaya lokal, kondisi situs budaya, serta integrasi nilai budaya dalam

tata ruang wilayah. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan relevansi dan pengetahuan mereka terhadap topik penelitian. Informan yang dipilih meliputi aparatur pemerintah daerah (terutama dari dinas kebudayaan dan perencanaan), pelaku budaya seperti seniman dan komunitas adat, akademisi, serta generasi muda. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan sumber informasi yang kaya dan mampu memberikan perspektif yang beragam terkait tata kelola dan implementasi kebijakan budaya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen penting, seperti peraturan daerah mengenai pelestarian budaya, RPJMD, kebijakan terkait implementasi SDG 11, laporan kegiatan dinas terkait, serta data statistik sektor budaya dan pariwisata. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperkuat data lapangan sekaligus sebagai bahan triangulasi guna meningkatkan keabsahan temuan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti tata kelola, partisipasi masyarakat, transparansi, konflik kepentingan, dan integrasi budaya dalam pembangunan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman hubungan antar informasi. Penyajian ini membantu peneliti dalam melihat pola dan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah dianalisis serta mengaitkannya dengan teori dan konsep SDG 11. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi kembali kepada informan (*member checking*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam upaya pelestarian budaya lokal secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Topeng Malangan

Berdasarkan hasil wawancara, Sejarah Topeng Malangan berakar kuat pada masa kerajaan kuno di Jawa Timur, yang pada mulanya berfungsi sebagai sarana bagi penguasa untuk berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Berdasarkan penuturan lisan, tradisi penyamaran ini dikaitkan dengan masa Kerajaan Kanjuruhan, di mana Raja Gajayana menggunakan topeng untuk menutupi identitas aslinya agar dapat membaur di tengah masyarakat tanpa sekat protokoler kerajaan. Pola interaksi penyamaran tersebut kemudian berevolusi seiring berjalannya waktu, bertransformasi dari sekadar alat penutup wajah penguasa menjadi sebuah bentuk kesenian yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Memasuki era Kerajaan Singasari, tradisi menggunakan topeng ini mulai digubah menjadi sebuah sendratari atau seni pertunjukan panggung yang mengadopsi struktur

cerita kepahlawanan. Konsep pertunjukannya mengadaptasi pola epos Ramayana, namun disesuaikan ke dalam konteks budaya lokal melalui siklus cerita Panji. Lakon utama dalam seni Topeng Malangan ini berpusat pada kisah asmara dan perjuangan antara Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Konflik dramatik muncul ketika Raja Klono dari kerajaan seberang jatuh cinta pada Dewi Sekartaji dan melancarkan berbagai upaya untuk merebutnya, yang kemudian menjadi inti dari koreografi sendratari tersebut.

Dalam perkembangannya hingga era modern, pelestarian Topeng Malangan tidak hanya bertumpu pada seni pertunjukan, tetapi juga beralih pada industri kreatif dan pemberdayaan sosial melalui sanggar seni. Sejak tahun 2015, inisiatif replikasi topeng mulai dikembangkan dengan memanfaatkan bahan alternatif seperti bubur kertas dan resin. Langkah ini sengaja diambil sebagai strategi diferensiasi produk sekaligus menjaga keberlangsungan pasar bagi pengrajin topeng kayu tradisional agar tidak saling mematikan. Selain itu, aktivitas pembuatan seni topeng ini juga diintegrasikan sebagai program keterampilan vokasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus (SLB) melalui yayasan sosial guna menjaga roda regenerasi budaya Malang tetap berputar.

Peran Pelaku Seni dalam Melestarikan Budaya Topeng Malangan

Berdasarkan hasil wawancara, para pelaku seni berperan sebagai agen perubahan yang kompleks, strategis, inovator, pendidik, penggerak komunitas, serta wirausahawan budaya. Dari tingkat perajin independen hingga sanggar seperti Sanggar Topeng, upaya pelestarian dimulai dengan dokumentasi dan transformasi cerita tradisional yang melatarbelakangi topeng malangan. Dalam ranah produksi, pelaku seni menunjukkan inovasi material dengan mengurangi ketergantungan pada kayu sebagai bahan baku utama yang makin langka, beralih ke resin, kertas, dan untuk prototipe, langkah ini adalah strategi pelestarian jangka panjang yang juga menjaga keberlanjutan pasar melalui produk yang lebih tahan lama dan mudah direplikasi. Pelaku seni juga mendiversifikasi produk turunan seperti kue topeng, cokelat topeng, dan merencanakan batik cap sebagai alternatif batik tulis, sehingga nilai budaya Topeng Malangan meresap ke dalam produk hidup yang bernilai ekonomi. Peran pelaku seni dalam pelestarian Topeng Malangan juga sangat menonjol di bidang pendidikan dan inklusi sosial. Sejak tahun 2019, mereka telah menjalin kolaborasi dengan sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk mendorong generasi muda ikut peduli dan berperan aktif dalam menjaga budaya Topeng Malangan melalui pembuatan topeng, pelukisan, hingga pameran dan pertunjukan. Selain itu, pelaku seni juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjual dan melakukan pameran seperti halnya yang terjadi di lobby DPRD, UMKM Corner, dan galeri kecil sebagai lokasi pameran, pertunjukan, dan interaksi langsung dengan publik, sehingga pelestarian Topeng Malangan berlangsung di konteks sosial yang riil dan memperkuat legitimasi budaya sebagai milik bersama. Secara keseluruhan, peran pelaku seni dalam melestarikan Topeng Malangan adalah sinkron antara pelestarian budaya dengan inovasi desain, produksi berkelanjutan, pendidikan budaya inklusif, partisipasi komunitas, serta wirausaha budaya yang terintegrasi. Model ini menekankan bahwa pelestarian tidak bersifat pasif sebagai penjaga, melainkan sebagai penggerak perubahan yang menggabungkan tradisi, inovasi,

pendidikan, inklusi sosial, dan kewirausahaan secara holistik, agar Topeng Malangan tetap relevan, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi bagi komunitas lokal

Peran Pemerintah dalam Melestarikan Budaya Topeng Malangan

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal, termasuk kesenian Topeng Malangan sebagai warisan budaya khas Kabupaten dan Kota Malang. Dalam konteks pelestarian budaya, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, edukator, serta promotor budaya daerah agar tetap eksis di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah melalui kebijakan perlindungan dan pengembangan budaya daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap sanggar seni, komunitas budaya, serta pelaku seni Topeng Malangan melalui bantuan pendanaan, penyediaan fasilitas pertunjukan, hingga program pembinaan generasi muda. Upaya ini penting mengingat minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kesenian tradisional mulai mengalami penurunan akibat dominasi budaya populer dan perkembangan teknologi digital. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam bidang pendidikan dan pewarisan budaya. Pelestarian Topeng Malangan dapat dilakukan melalui integrasi muatan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan, pelatihan seni di sekolah, maupun penyelenggaraan festival budaya secara rutin. Penelitian Dewi Kartika Sari menunjukkan bahwa proses pewarisan budaya Topeng Malangan dilakukan melalui metode *learning by doing* di Sanggar Asmorobangun sebagai bentuk pembelajaran informal yang efektif dalam menjaga regenerasi pelaku seni. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung keberadaan sanggar budaya sebagai pusat pendidikan kebudayaan masyarakat.

Peran pemerintah juga terlihat dalam promosi budaya melalui media digital dan pariwisata budaya. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, platform digital, serta event kebudayaan untuk memperkenalkan Topeng Malangan kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan domestik dan internasional. Pemanfaatan teknologi digital dinilai efektif untuk meningkatkan eksistensi budaya tradisional di era modern. Penelitian mengenai penggunaan media sosial dalam pelestarian Tari Topeng Malangan menunjukkan bahwa media digital mampu menjadi sarana edukasi, promosi, dan peningkatan partisipasi generasi muda terhadap budaya lokal. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga nilai filosofis dan identitas budaya Topeng Malangan agar tidak mengalami degradasi makna akibat komersialisasi budaya. Topeng Malangan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengandung nilai simbolik, moral, dan historis masyarakat Jawa Timur. Oleh sebab itu, kebijakan pelestarian harus tetap memperhatikan aspek autentisitas budaya serta perlindungan terhadap nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pelestarian Topeng Malangan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku seni, lembaga pendidikan, dan media digital. Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan kebijakan, fasilitas, serta ruang budaya yang mampu menjaga keberlangsungan Topeng Malangan sebagai identitas budaya lokal yang bernilai historis dan edukatif bagi generasi mendatang.

Analisis

Merujuk pada teori pelestarian budaya yang dikemukakan oleh [Jacob \(2005\)](#), upaya pelestarian suatu warisan budaya mencakup dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu *konservasi* (perlindungan fisik objek budaya) dan *revitalisasi* (pembaruan nilai dan makna budaya agar tetap relevan bagi generasi masa kini dan mendatang). Kerangka konseptual ini menjadi pisau analisis yang tepat untuk membedah kondisi pelestarian Topeng Malangan di Kota Malang, sebab persoalan yang dihadapi tidak semata-mata bersifat fisik, melainkan juga menyangkut kebermaknaan budaya di tengah tekanan modernisasi dan perubahan selera generasi muda.

Dari dimensi konservasi fisik, temuan lapangan menunjukkan bahwa para pelaku seni Topeng Malangan telah melakukan inovasi material secara mandiri, yakni dengan beralih dari penggunaan kayu yang semakin langka menuju bahan alternatif seperti resin dan kertas. Langkah ini sejalan dengan prinsip konservasi [Jacob \(2005\)](#) yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan produksi objek budaya tanpa mengorbankan keaslian estetika dan fungsinya. Di sisi pemerintah, upaya konservasi terwujud melalui penyediaan fasilitas pameran di ruang-ruang publik seperti *lobby* DPRD, UMKM Corner, dan galeri komunitas, yang berfungsi sebagai wadah fisik bagi eksistensi Topeng Malangan agar tidak tergerus dari ruang kehidupan kota. Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa konservasi fisik yang ada masih bersifat reaktif dan parsial. Belum terdapat *roadmap* pelestarian yang komprehensif dan terukur dari pemerintah daerah, sehingga perlindungan fisik warisan budaya ini masih bertumpu pada inisiatif individu pelaku seni di akar rumput, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat. Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh [Jacob \(2005\)](#) disebut sebagai kerentanan konservasi akibat lemahnya *institutional framework* yang menopangnya.

Pada dimensi revitalisasi nilai, upaya yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan jauh lebih dinamis dan menjanjikan. [Jacob \(2005\)](#) menegaskan bahwa revitalisasi yang sejati bukan sekadar menghidupkan kembali bentuk lahiriah suatu budaya, melainkan memperbaharui relevansi makna dan fungsi sosialnya dalam konteks kekinian. Dalam kasus Topeng Malangan, diversifikasi produk turunan seperti kue topeng, cokelat topeng, dan rencana batik cap merupakan bentuk revitalisasi nilai yang kreatif, nilai estetika dan simbolisme Topeng Malangan ditransformasikan ke dalam produk kehidupan sehari-hari yang memiliki daya jangkau lebih luas di kalangan masyarakat urban. Lebih jauh, kolaborasi pelaku seni dengan sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sejak tahun 2019 merupakan strategi revitalisasi yang berorientasi pada pewarisan nilai lintas generasi dan inklusivitas sosial. Pendekatan *learning by doing* yang diterapkan di Sanggar Asmorobangun menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni topeng tidak diwariskan secara dogmatis, melainkan melalui keterlibatan aktif dan pengalaman langsung peserta didik, yang justru memperkuat internalisasi nilai budaya tersebut dalam kehidupan generasi muda.

Namun, teori pelestarian budaya [Jacob \(2005\)](#) juga mengingatkan akan jebakan pendekatan “museum” yang kaku, yakni kecenderungan untuk membekukan budaya pada satu titik historis tertentu tanpa memberi ruang bagi dinamika dan evolusi alamiahnya.

Dalam konteks Topeng Malangan, jebakan ini terlihat pada sebagian kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pelestarian dalam arti penjagaan artefak dan pertunjukan formal, alih-alih mendorong inovasi yang organik dari komunitas pelaku seni itu sendiri. Ketika pelestarian semata-mata bersifat seremonial dan terjadwal misalnya hanya hadir dalam festival budaya tahunan tanpa ekosistem yang hidup sehari-hari maka yang terjadi adalah pelestarian bentuk tanpa revitalisasi jiwa. Topeng Malangan berisiko menjadi objek pajangan identitas kota yang kehilangan vitalitas sosialnya. Oleh karena itu, sesuai dengan argumen [Jacob \(2005\)](#), strategi pelestarian yang efektif harus memadukan konservasi fisik yang sistematis dengan revitalisasi nilai yang adaptif dan partisipatif, agar warisan budaya tidak hanya bertahan dalam ingatan kolektif, tetapi benar-benar hidup dan berkembang dalam praktik keseharian masyarakat Kota Malang.

Lebih lanjut, apabila teori pelestarian budaya ini disinergikan dengan kerangka *digital government* dalam konteks SDG 11, maka platform digital seharusnya berperan ganda, pertama, sebagai instrumen konservasi melalui digitalisasi arsip, dokumentasi audio-visual pertunjukan, dan pemetaan sebaran sanggar seni, kedua, sebagai medium revitalisasi melalui narasi budaya yang aksesibel, interaktif, dan menjangkau segmen generasi muda yang akrab dengan teknologi. Penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi Topeng Malangan yang telah berjalan merupakan langkah awal yang positif, namun masih perlu diperkuat dengan tata kelola digital yang terstruktur agar dampaknya bersifat sistemik dan berkelanjutan, bukan sekadar viral sesaat. Dengan demikian, integrasi antara teori pelestarian budaya [Jacob \(2005\)](#) dan implementasi *digital government* membuka peluang bagi terciptanya ekosistem pelestarian Topeng Malangan yang tidak hanya menjaga keaslian warisan budaya, tetapi juga memastikan relevansi dan keberlanjutannya sebagai identitas kolektif Kota Malang yang hidup dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian Topeng Malangan di Kota Malang telah berjalan melalui dua dimensi utama teori [Jacob \(2005\)](#), yaitu konservasi fisik melalui inovasi bahan baku dari kayu ke resin dan kertas serta penyediaan ruang pameran publik, dan revitalisasi nilai melalui diversifikasi produk turunan, kolaborasi dengan sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman atau *learning by doing* di sanggar seni, namun konservasi fisik masih bersifat reaktif dan parsial karena belum adanya *roadmap* pelestarian yang komprehensif dari pemerintah daerah, sementara revitalisasi nilai menunjukkan dinamika menjanjikan namun menghadapi risiko jebakan pendekatan "museum" yang kaku. Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa pelestarian budaya tak benda memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan seremonial-arsipan menuju ekosistem pelestarian yang hidup, di mana pelaku seni berperan sebagai motor utama perubahan melalui inovasi material, pendidikan inklusif, dan kewirausahaan budaya, sementara pemerintah daerah perlu bertransformasi dari peran fasilitator pasif menjadi katalisator strategis yang menyediakan kerangka kebijakan sistemik, pendanaan berkelanjutan, dan perlindungan hukum yang kuat.

Rekomendasi praktis yang diajukan meliputi penguatan peran ganda platform digital sebagai instrumen konservasi melalui digitalisasi arsip dan dokumentasi audio-visual sekaligus sebagai medium revitalisasi melalui narasi budaya interaktif yang menjangkau generasi muda, pembentukan *roadmap* pelestarian yang komprehensif dan terukur, peningkatan kapasitas pelaku seni dalam literasi digital dan kewirausahaan budaya, serta integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam perencanaan pembangunan kota melalui mekanisme tata kelola warisan budaya atau *cultural heritage governance* yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian komparatif antar daerah dengan warisan budaya serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik pelestarian, penelitian kuantitatif tentang efektivitas platform digital dalam meningkatkan partisipasi generasi muda, serta studi longitudinal yang mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan pelestarian terhadap keberlanjutan ekosistem budaya dan kesejahteraan komunitas seniman, guna memperkuat basis bukti bagi perumusan kebijakan pelestarian budaya yang lebih responsif dan berkelanjutan di era transformasi digital.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Asshididie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Kompas. 68-72 <https://media.neliti.com/media/publications/81058-ID-memperkenalkan-gagasan-konstitusi-ekonom.pdf>
- Azzahran, A. F., & Wibowo, N. E. (2024). Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam pelestarian budaya lokal di era digital. *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 7(2), 792-801.
- Bado, B. (2022). Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah.
- Buragohain, D., Meng, Y., Deng, C., Li, Q., & Chaudhary, S. (2024). Digitalizing cultural heritage through metaverse applications: challenges, opportunities, and strategies. *Heritage Science*, 12(1), 1-16.
- Cahya, L. Y. I., Eni, S. P., & Sudarwani, M. M. (2023). Kajian Tata Kelola Kota Tua Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung Sebagai Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 7(2), 256-264.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press. 21-25 <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/pengantar-analisis-kebijakan-publik-edisi-kedua>
- Febriantini, K. T., Indriani, N. K., Kusuma, B. O., & Yuniari, N. K. Y. (2019). Sinergitas pemerintah desa dan kelembagaan lokal subak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis subak sebagai warisan budaya dunia (Studi kasus: Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 189-202.
- Hidajat, R. (2005). Struktur, simbol, dan makna wayang topeng Malang. *Jurnal BS*, 2(1), 270-281.

- Hidayat, R. (2012). Wayang topeng Malang dalam perubahan kebudayaan. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 10(2).
- Jacob, C. R. (2005). *Cultural heritage management*. Routledge.
- Kamal, M. (2008). Wayang Topeng Malangan: Sebuah Kajian Historis Sosiologis. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*, 9(1).
- Koten, S. I. (2024). Budaya Wayang Topeng Malang dalam Perspektif Antropologi Budaya Menurut Koetjaraningrat. *Jurnal Budaya*, 5(2), 76-82.
- Melany, S., & Tr, M. M. (2015). Tari Topeng Malangan Sebagai Alternatif Wisata Budaya di Kota Malang.
- Mustikasari, B. F., Wardani, N. K., & Pradani, R. Y. (2025). Eksplorasi Motif Topeng Malangan sebagai Upaya Pelestarian Budaya melalui Pengembangan Material Fesyen. *GESTALT: JURNAL DESAIN KOMUNIKASI VISUAL*, 7(1), 41-52.
- Marsiatanti, D. Y. (2011). *Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Muniroch, S., Furaida, A., Surur, M., Dinanty, A. D., & Ilmiyah, N. Z. (2025). Pelestarian Tari Topeng Malangan di kalangan remaja Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (sertifikat hak cipta).
- Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). Systematic Literature Review: Tata Kelola Kolaboratif Dalam Sektor Publik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 1-22.
- Ningrum, R. A. (2020). *Peran pemerintah Kota Malang dalam upaya melestarikan kesenian tari Topeng Malangan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Pratiwi, M. A., Giriwati, N. S. S., Yusran, Y. A., & Santosa, H. (2022). Strategi pengembangan Kampung Topeng Malang sebagai kampung wisata budaya. *RUAS*, 20(2), 85-96.
- Rafif, A. S. (2025). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Topeng Malangan Guna Memperkuat Pembangunan Budaya Di Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Kurniawan, A. R. (2025). Integrated Rural Development: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(1), 1-12.
- Rachmadian, A. (2016). Pengaruh masuknya budaya asing terhadap pelestarian kebudayaan tari tradisional wayang topeng malangan di Malang Raya, Jawa Timur. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 1(2).
- Sari, D. K. (2021). Proses pewarisan budaya Topeng Malangan melalui learning by doing dalam setting pembelajaran informal. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 5(2), 9-21.
- Sibarani, R. (2012). *Kearifan lokal: Hakikat, peran, dan metode tradisi lisan*. Asosiasi Tradisi
- Wulan, D. A., Widyaningsih, G. E. N., Goeyardi, W., Azarena, A. S., Sa'diyah, F. F., Sacalaros, D. D., ... & Atifah, N. S. (2024). Digitalisasi Kegiatan Seni Budaya Sanggar Seni Topeng Malang Asmorobangun dalam Media Sosial Sebagai Sarana

Peningkatan Pelestarian Budaya. *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 332-342.

Wibowo, A., Priyatna, A., & Sobarna, C. (2019). Modifikasi Wayang Topeng Malangan di Padepokan Asmoro Bangun, Kedungmonggo Pakisaji, Malang. *Panggung*, 29(3), 298337.